

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Muktiwari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, maka peneliti menarik kesimpulan dilihat dari empat indikator pengawasan Menurut Robbins (2016) yaitu pengawasan sebagai Standart, pengawasan sebagai Measurement, pengawasan sebagai Compere, dan indikator pengawasan sebagai Action. Dari empat indikator ini peneliti melakukan penelitian dengan cara membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi alat ukur wawancara. Dari hasil wawancara ini menghasilkan sebuah kesimpulan.

Dilihat pada aspek tentang tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas kinerja Kepala Desa dari segi pembangunan, disini peneliti menemukan suatu permasalahan seperti pembangunan jalan kenapa masih belum sesuai standar dalam pembangunan infrastruktur yang sudah ditentukan.

Terdapat suatu permasalahan tentang minimnya pengetahuan tentang tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini yang menyebabkan tentang lemahnya tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Kinerja Kepala Desa. Dari berbagai permasalahan terdapat suatu yang mendasar seperti kurangnya pengetahuan tentang tugas pokok Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini diketahui setelah peneliti melakukan wawancara dengan Aparatur Pemerintah Desa Muktiwari. Peneliti juga masih melihat beberapa masyarakat yang masih belum mengerti dan paham tugas pokok Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini ditemukan setelah peneliti melakukan wawancara terhadap masyarakat.

Proses berjalannya penelitian di Desa Muktiwari peneliti menemukan beberapa masyarakat masih berbeda pendapat tentang adanya dua kubu yang masih berselisih paham, ini menjadi penghambat bagi kemajuan pembangunan

infrastruktur di Desa Muktiwari. Hal ini juga diketahui setelah peneliti melakukan wawancara terhadap masyarakat Desa Muktiwari.

Dari berbagai kegiatan terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Muktiwari terdapat beberapa hambatan-hambatan diantaranya yaitu seperti yang sudah disebutkan tadi seperti kurangnya pemahaman terhadap Kinerja Badan Permusyawaratan Desa rendahnya pengetahuan Aparatur Desa terhadap tugas pokok Badan Permusyawaratan Desa, masih adanya 2 kubu masyarakat setelah pemilihan Kepala Desa dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat Desa tentang tugas pokok Badan Permusyawaratan Desa bagi Kinerja Kepala Desa. Tetapi dilihat dari sisi lain, keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Muktiwari sudah cukup bagus dalam pengawasan Kinerja Kepala Desa. Selain itu juga bermanfaat sebagai penampung aspirasi masyarakat.

Dari adanya hambatan-hambatan tersebut dapat disimpulkan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugas pokoknya sudah cukup baik karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membantu masyarakat sebagai penyalur Aspirasi Masyarakat kenapa dikatakan cukup karena masih ada segelintir Aparatur Desa dan Masyarakat masih kurang pemahamannya terhadap tugas pokok Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap masyarakat.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kemajuan Pemerintah di Desa Muktiwari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi agar meningkatkan Kinerja yang telah ada khususnya untuk Kepala Desa. Penulis menyarankan untuk anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ada upaya untuk memajukan Kinerja serta memajukan Desa. Serta harapan penulis agar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bisa terus melakukan sosialisasi tentang tugas pokok Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada masyarakat Desa Muktiwari dengan adanya sosialisasi ini masyarakat dapat mengetahui tugas

pokok Badan Permusyawaratan Desa, hal ini sangat penting bagi kemajuan Desa Muktiwari dan masyarakat merasa puas terhadap Kinerja dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).